

Pemberian Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Kendaraan Dinas di Perguruan Tinggi Negeri Dalam Perspektif Perundang-Undangan

ABSTRAK

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pengelolaan aset, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada pemerintah pusat pengaturan mobil dinas diatur melalui mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Ketentuan Kepemilikan diatur pada pasal 43 ayat 3 dan 4 yaitu Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemeirntah Daerah yang bersangkutan. Kepemilikan mobil dinas telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (normative legal research), penelitian normatif merupakan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum teoritis yang menggunakan data primer, sekunder, dan tersier seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, teori hukum dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana, serta melakukan wawancara kepada para ahli hukum atau narasumber terkait. Data di dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam hal ini sanksi hanya ada diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun tidak ada secara tegas pada objek penyalahgunaan barang milik negara. Selain itu khusus barang milik negara yang berupa kendaraan dinas, faktanya yang menggunakan kendaraan dinas diuar tugas dan fungsi kedinasan bukanlah pejabat yang berwenangnya, namun seringkali staf atau keluarga pejabatnya.

Kata Kunci. *Kendaraan Dinas, Sanksi, Peraturan perundang-undangan.*

Sanctioning the Misuse of Service Vehicles in State Universities in the Perspective of Legislation

ABSTRACT

The provisions of the governing laws and regulations related to asset management include Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury. In the central government, the regulation of official cars is regulated through Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State / Regional Property Ownership Provisions are regulated in article 43 paragraphs 3 and 4, namely State Property other than land and / or buildings must be equipped with proof of ownership in the name of the Goods User and Regional Property other than land and / or buildings must be equipped with proof of ownership in the name of the Regional Government concerned. Ownership of official cars has been regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 172 / PMK.06 / 2020 concerning Goods Standards and State Property Needs Standards. This research uses normative legal research methods, normative research is doctrinal legal research or theoretical legal research that uses primary, secondary, and tertiary data such as using laws and regulations, academic papers, legal theories can be in the form of scientific works of scholars, and conducting interviews with legal experts or related sources. The data in writing this article was obtained in two ways, namely field research and literature research. In this case, the sanctions are only regulated in the provisions of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline, but not in the provisions of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline.

Keywords. *Service Vehicles, Sanctions, Legislation.*